

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KANCAH POLITIK
(STUDI KASUS PENDAPAT PEREMPUAN KOTA SAMARINDA)
Woman Delegation in Political Arena
(Case Study of Woman Opinion in Samarinda)**

**Fajar Apriani
Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Mulawarman**

Abstract

Culture, social system, political system, till poorness problem, still become the sturdy barrier wall in political participation of woman. In Indonesia, there are at least two woman problem in politics. First of very low problem woman delegation in public space. And second, the problem of the existence of party platform which hold a brief for woman. Feminist circle by itself believe that more amount place for woman in the world of politics will give the 'fresh wind' and expectation for politics change which arrogant, corrupt and patriarchies.

On that account later; then quota 30% for woman in parliament in General Election 2004 becoming of vital importance in order to affirmative action utilize to give a wide opportunity for woman to act in the field of politics.

Key words : Woman participation, political delegation, feminist.

PENDAHULUAN

Bagi perempuan, konsep demokrasi dapat menjadi satu hal yang sangat diidamkan namun sekaligus juga mimpi buruk. Demokrasi yang diwariskan melalui tradisi Yunani, jelas tidak mengikutkan perempuan dan budak. Bahkan kaum liberal awal dengan mudahnya mengatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa mengaitkan bahwa perempuan juga berharap dapat memilih dalam pemilihan umum. Terkadang demokrasi juga digunakan sebagai justifikasi akan superioritas suku, agama dan gender tertentu (2004 : 4).

Berkaitan dengan peran perempuan dalam bidang politik, gerakan perempuan sesungguhnya bertujuan untuk memulihkan hak-hak politik yang erat kaitannya dengan proses transformasi sosial yang identik dengan transformasi demokrasi (2004). Gerakan perempuan juga bertujuan untuk menciptakan hubungan antar sesama manusia yang secara fundamental baru, lebih adil, dan saling menghargai.

Politik, terlepas dari segala kontroversi di dalamnya, adalah alat sosial yang paling memungkinkan bagi terciptanya ruang kesempatan dan wewenang, serta memungkinkan rakyat mengelola dirinya sendiri melalui berbagai aksi

bersama, diskusi, *sharing*, dalam prinsip kesetaraan dan keadilan. Politik adalah salah satu sarana yang dapat mendorong perempuan untuk mencurahkan semua kecemasannya (Wijaksana, 2004).

Budaya, sistem sosial, sistem politik, hingga masalah kemiskinan, masih menjadi tembok penghalang yang kokoh dalam partisipasi politik perempuan. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah usaha yang lebih strategis agar dapat mengubah kondisi tersebut. Memasuki wilayah strategis berarti memasuki wilayah pengambilan kebijakan alternatif yang bersahabat dengan perempuan. Salah satu cara yang dapat dipilih adalah perempuan masuk dalam tataran kekuasaan dan legislasi atau dengan memperkuat kontrol dan akses perempuan di wilayah tersebut.

Penyebabnya adalah kekuasaan dan legislasi merupakan aspek yang sangat menonjol dalam menentukan corak ideologi masyarakat dan pengaturan sumber daya pembangunan. Apabila menginginkan keadilan pengaturan sumber daya bagi laki-laki dan perempuan secara adil, satu-satunya jalan adalah terlibat langsung dalam setiap tahapan pengaturan tersebut (Wijaksana, 2004).

Di Indonesia, paling tidak terdapat dua persoalan perempuan dalam politik. Pertama masalah keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik. Dan kedua, masalah belum adanya *platform* partai yang secara konkrit membela kepentingan perempuan. Kalangan feminis sendiri meyakini bahwa tempat lebih banyak bagi perempuan dalam dunia politik akan memberikan 'angin segar' dan harapan bagi perubahan politik yang arogan, korup dan patriarkhis.

Oleh sebab itu kemudian kuota 30% bagi perempuan di parlemen dalam Pemilihan Umum 2004 menjadi sangat penting dalam rangka tindakan afirmatif (*affirmative action*) guna memberikan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk berkiprah dalam bidang politik. Basis pemikiran lainnya adalah adanya keyakinan bahwa dengan maju ke ruang publik dan menduduki tempat-tempat strategis pengambilan keputusan merupakan cara agar kepentingan perempuan dapat terwakili.

Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan akan mampu membawa masyarakat Indonesia pada perubahan sistem yang berkeadilan dan bersih dari korupsi. Diyakini, masuknya perempuan dalam pengambilan

keputusan menjadi penting dalam rangka menciptakan dunia baru, dunia yang bebas diskriminasi (2004 : 4).

Sudah saatnya perspektif gender masuk pada segala lini kehidupan, terutama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah. Jika hal tersebut selama ini belum sempat dilakukan tak lain adalah karena kehidupan sosio-politik Indonesia hanya dilihat dari 'kacamata' laki-laki. Sementara warga perempuan sendiri kian terpinggirkan dan dianggap tidak layak memasuki bidang politik. Politik dianggap sebagai dunia yang kejam dan kotor.

Sejarah yang sudah lama ada melalui rangkaian konvensi yang sangat kuat membuat perempuan tersisih dari dunia politik melalui perbedaan antara peran privat dan publik. Secara serius, perbedaan ini memotong akses perempuan ke lingkup publik. Perempuan terus-menerus dipatok pada kewajiban-kewajiban di lingkup privat yang menghabiskan hampir seluruh waktunya setiap hari. Seharusnya negara juga melindungi aktivitas perempuan di dunia politik, sebuah langkah konkrit yang dapat dipelajari dari negara tetangga adalah dengan melarang rapat-rapat partai dan parlemen hingga larut malam, tidak merokok di dalam ruang rapat, hingga kebijakan yang mengakomodir kebutuhan yang spesifik bagi perempuan, misalnya ruang penitipan anak maupun ruang menyusui. Intinya, politik seharusnya juga ramah terhadap perempuan.

Suara perempuan dalam pemilihan umum kini menjadi begitu bermakna, dimana pesta demokrasi kelak akan berujung di kotak suara. Disanalah harapan besar para pembela hak-hak perempuan guna meloloskan beberapa Rancangan Undang-undang (RUU) yang secara spesifik melindungi perempuan.

Pelaksanaan Pemilu 2004 lalu memang berbeda dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Disamping tata cara pemilihannya, Pemilu 2004 lalu menegaskan adanya keterwakilan perempuan sebanyak 30% yang dapat dicalonkan oleh partai politik di setiap daerah pemilihan. Dengan demikian, perempuan mempunyai kesempatan secara langsung untuk terlibat dalam proses politik melalui ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30% tersebut. Proses ini juga menyimpan harapan akan tuntutan diperhatikannya sejumlah persoalan perempuan yang selama ini hampir tidak diperhatikan oleh pembuat kebijakan di parlemen.

Namun demikian, di tengah harapan itu, rasanya sulit menyembunyikan kecemasan, khususnya berkaitan dengan komitmen partai politik sebagai penyedia caleg perempuan. Setinggi apa pun harapan itu, nampaknya akan menjadi mustahil bila partai politik tidak memiliki komitmen akan kesungguhan menominasikan caleg perempuan. Apalagi dalam undang-undang partai politik tidak mewajibkannya secara tegas.

CETRO (*Centre of Electoral Reform*) dalam siaran persnya pada Jakarta, 6 Januari 2004, yang berjudul “Antara Janji dan Fakta : Partai Politik Belum Optimal Meningkatkan Keterwakilan Perempuan” mengatakan bahwa partai politik belum optimal meningkatkan keterwakilan perempuannya. Menurut CETRO, proses ini tidak berjalan alami dimana partai politik tidak sungguh-sungguh meningkatkan keterwakilan perempuan.

Menganalisis keterwakilan perempuan dalam kancah politik di Indonesia dapat terbantu dengan membandingkan apa yang telah dilakukan perempuan di beberapa negara tetangga yang memiliki latar belakang sosial, budaya atau politik yang relatif mirip. Misalnya, India.

India, yang disebut sebagai negeri demokrasi terbesar itu, memiliki jaminan keadilan perempuan dalam konstitusi yang ditegaskan secara nyata. Hak perempuan terbebas dari segala bentuk diskriminasi atau pelarangan yang berdasarkan perbedaan gender, kasta, agama, ras atau daerah kelahiran yang dijamin dalam Undang-undangnya. Konstitusi India juga menjamin bahwa laki-laki dan perempuan akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Bahkan untuk keterwakilan perempuan dalam politik, konstitusi India jauh lebih progresif dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Jika di Indonesia keterwakilan itu diatur oleh peraturan setingkat undang-undang – itu pun dengan sebuah “pasal karet” – maka konstitusi India sudah dengan tegas menjamin perempuan akan menempati perwakilan tingkat desa / lokal yang disebut *Panchayat* sepertiga dari seluruh anggota parlemen.

Hal yang tak kalah progresif juga telah diraih oleh Bangladesh, yang merupakan negara termiskin di dunia. Namun memiliki konstitusi yang tak kalah kuat dibandingkan dengan negara-negara lain yang jauh lebih maju secara ekonomi. Hampir mirip dengan India, Konstitusi Bangladesh juga menjamin hak-

hak fundamental warga negara termasuk perempuan pada Bagian II tentang *Fundamental Principles of State Policy* (Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Negara).

Negara dan masyarakat harus menciptakan kondisi yang diperlukan bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas dirinya dalam semua bidang kehidupan dan secara penuh berperan dalam kehidupan masyarakat, dan semua unit kesejahteraan, termasuk sarana penerangan di tempat kerja, memberikan kesempatan perempuan untuk lebih aktif dalam pekerjaan dan belajar, menikmati pelayanan kesehatan, menikmati cuti haid, dan menunaikan kewajiban kehamilannya.

Berikut disajikan data mengenai jumlah anggota parlemen perempuan dan persentasenya di beberapa negara Asia :

Tabel 1. Jumlah Anggota Parlemen Perempuan dan Persentase di Beberapa Negara Asia

No	Negara	Pemilu	Jumlah Kursi	Jumlah Anggota Parlemen	%
1	Vietnam	Mei 2002	498	136	27,3
2	Pakistan	Oktober 2002	342	74	21,6
3	Filipina	Mei 2001	214	38	17,8
4	Malaysia	September 1999	191	20	10,5
5	India	September 1999	543	48	8,8
6	Indonesia	Juni 1999	500	40	8,0
7	Sri Lanka	Desember 2001	225	10	4,4
8	Bangladesh	Oktober 2001	300	6	2,0

Sumber : Diolah dari *International Parliament Union*.

Prestasi mengesankan yang telah dicatat perempuan Vietnam berdasarkan tabel di atas jelas bersandar pada kebijakan-kebijakan pemerintah dan partai politik yang mendorong dan mempengaruhi perempuan untuk secara nyata terlibat dalam semua kebijakan yang berhubungan dengan perempuan. Vietnam kini memiliki konstitusi yang kokoh, pemerintah yang peduli dengan nasib perempuan, partai politik yang sensitif akan suara perempuan, dan organisasi masyarakat yang didukung konstituen perempuan.

Oleh sebab itu secara umum tak heran apabila selama 15 tahun terakhir ini Indonesia tidak pernah mampu menyusul Vietnam dari peringkat Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) berdasarkan penilaian UNDP sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Perbandingan *Human Development Index* Indonesia dan Vietnam Tahun 1990, 1995 dan 2000

No	Tahun	Indonesia		Vietnam	
		Indeks	Ranking	Indeks	Ranking
1	1990	0,623	110	0,605	109
2	1995	0,664	110	0,649	109
3	2000	0,684	110	0,688	109

Sumber : UNDP, *Human Development Index*, www.undp.org/hdr2002/indicator.

Penelitian ini diharapkan mampu menghimpun pendapat perempuan di Kota Samarinda mengenai keterwakilan perempuan dalam kancah politik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, dimana penelitian ini akan mengidentifikasi karakteristik perempuan di Kota Samarinda dan mengklasifikasi serta mengukur pendapat mereka tentang keterwakilan perempuan dalam kancah politik.

Dengan demikian, melalui jenis penelitian ini maka dapat dijelaskan secara terperinci mengenai pendapat perempuan di Kota Samarinda yang paling dominan mengenai keterwakilan perempuan dalam kancah politik, sehingga hasil penelitian pada akhirnya dapat memberikan rekomendasi kepada aparatur penyelenggara pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan dua macam metode pengumpulan data, yaitu survei yang kemudian dilengkapi dengan wawancara mendalam terhadap beberapa responden yang ditemui dalam survei.

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah 100 orang perempuan di kota Samarinda yang tersebar di enam wilayah kecamatan, yaitu Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Seberang, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu dan Samarinda Utara.

Dengan demikian, masyarakat kota Samarinda yang akan penulis teliti diwakili oleh 100 orang responden yang dipilih secara *accidental sampling*. Responden pada jajak pendapat ini adalah perempuan berusia 17 tahun ke atas (pada tahun 2004), dengan demikian adalah perempuan yang berusia 21 tahun (pada 2008) atau yang telah menikah atau yang memiliki hak pilih. Perempuan dijadikan sebagai responden penelitian dengan alasan karena selama ini suara, sikap dan pendapat perempuan hampir tidak terakomodasi dengan baik.

Sumber bukti bagi pengumpulan data penelitian ini adalah metode survei yang dilakukan dengan menyebarkan angket mengenai indikator keterwakilan perempuan dalam kancah politik. Angket disebar pada 100 orang perempuan di Kota Samarinda yang dilaksanakan selama dua minggu, mulai 19 Maret hingga 2 April 2008.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data demografi yang meliputi : tahun lahir, status perkawinan dan tingkat pendidikan.
2. Pendapat perempuan di Kota Samarinda mengenai keterwakilan perempuan dalam kancah politik.
3. Harapan perempuan di Kota Samarinda terhadap calon legislatif perempuan.
4. Kebijakan prioritas mengenai perempuan yang diinginkan perempuan di Kota Samarinda.

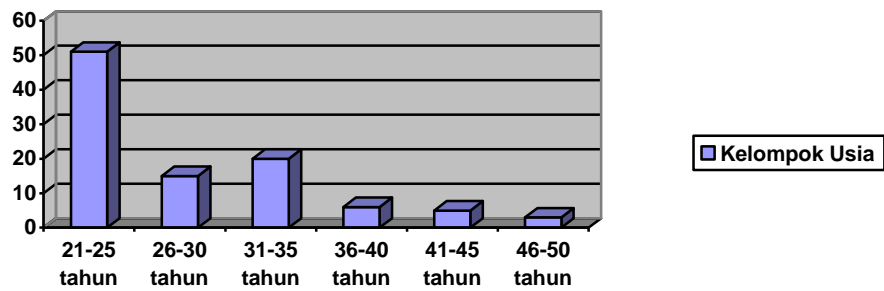
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tiga kegiatan yaitu : proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*), ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*) dan mengumpulkan data (*logging data*) (Nasution, 1992). Sedangkan alat analisa data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif. Data hasil survei seluruh responden diolah melalui program SPSS dan dianalisis berdasarkan tabel-tabel distribusi frekuensi dan tabel klasifikasi yang dihasilkan melalui program SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

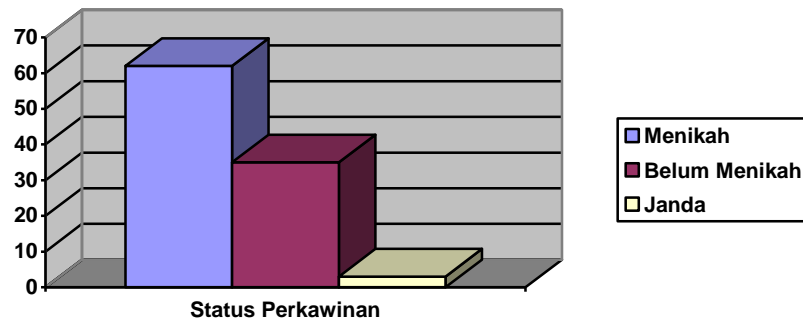
Responden penelitian ini adalah 100 orang responden perempuan yang tersebar di Kota Samarinda yang meliputi enam wilayah kecamatan. Berdasarkan usia, responden penelitian berusia antara 21 hingga 50 tahun. Responden dikelompokkan menjadi enam kelompok usia dengan menggunakan interval 5 sebagai berikut :

Diagram 1. Kelompok Usia Responden Penelitian



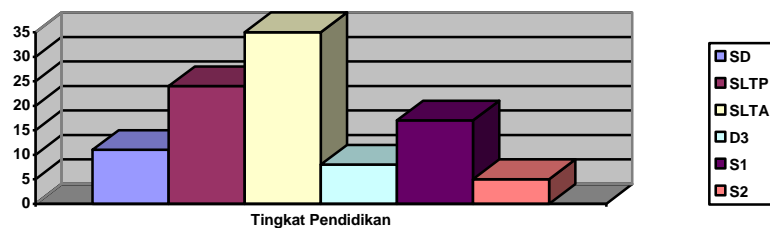
Mengenai status perkawinan responden penelitian, sebagian besar dari responden (62%) berstatus menikah, sedangkan lainnya belum menikah (35%) dan 3% berstatus janda.

Diagram 2. Status Perkawinan Responden Penelitian



Sebagian (65%) dari responden berpendidikan tinggi, yaitu 35% lulus maupun tidak lulus SLTA dan 30% mengenyam pendidikan tinggi, yang terdiri atas 8% lulus DIII, 17% lulus S1 hingga 5% lulus S2). Selebihnya berpendidikan rendah, yaitu 11% hanya berpendidikan SD (lulus maupun tidak lulus), dan 24% berpendidikan SLTP (lulus maupun tidak lulus) dan tidak ada yang tidak pernah bersekolah.

Diagram 3. Tingkat Pendidikan Responden Penelitian



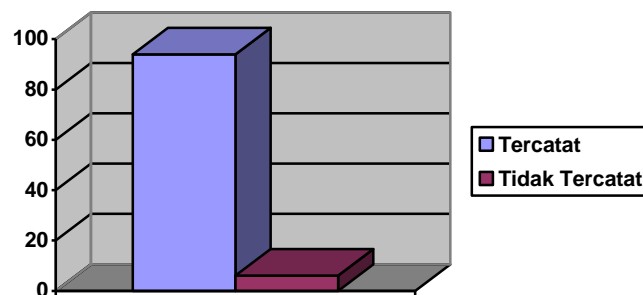
Hasil Penelitian

Pendapat Perempuan di Kota Samarinda mengenai Keterwakilan Perempuan dalam Kancah Politik

Pendapat responden mengenai keterwakilan perempuan dalam kancah politik, dalam bentuk pendapat setuju, tidak setuju atau tidak tahu terhadap sembilan item pertanyaan.

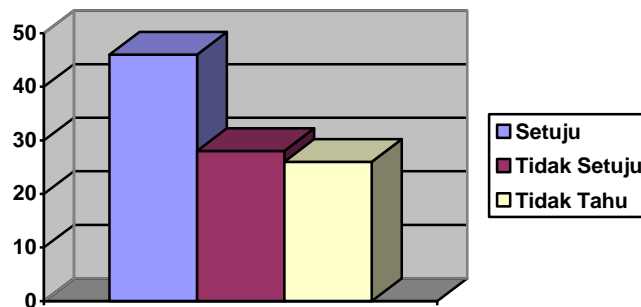
1. Pencatatan Perempuan sebagai Peserta Pemilu pada 2004

Diagram 4. Pencatatan Responden sebagai Peserta Pemilu 2004



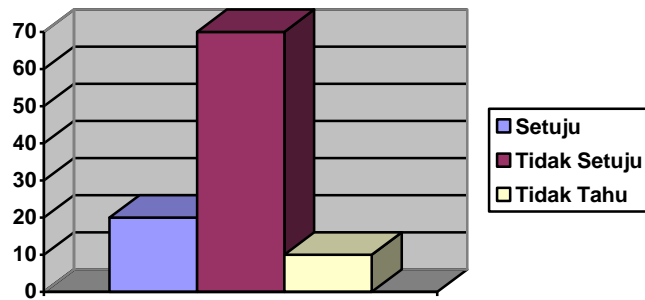
2. Pendapat Responden tentang Peluang Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik melalui Kuota Perempuan sebesar 30%

Diagram 5. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik melalui Kuota Perempuan sebesar 30%



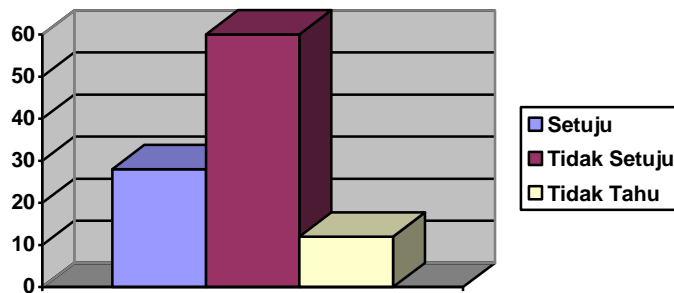
3. Pendapat Responden tentang Keengganan Perempuan Berpartisipasi dalam Bidang Politik Walaupun Partai Politik Telah Memberi Ruang bagi Perempuan

Diagram 6. Keengganan Perempuan Berpartisipasi dalam Bidang Politik Walaupun Partai Politik Telah Memberi Ruang bagi Perempuan



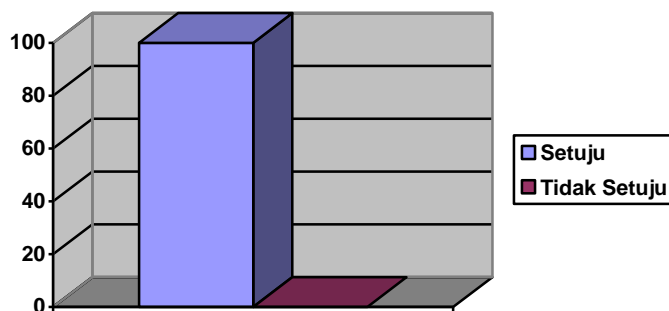
4. Pendapat Responden tentang Calon Legislatif Perempuan Tidak Berpengalaman di Bidang Politik

Diagram 7. Calon Legislatif Perempuan Tidak Berpengalaman di Bidang Politik



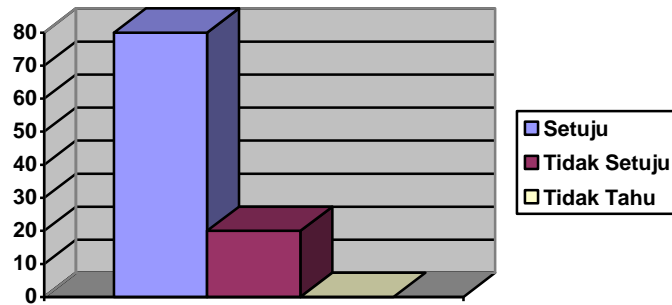
5. Pendapat Responden tentang Calon Legislatif Perempuan Tidak Berkualitas di Bidang Politik

Diagram 8. Calon Legislatif Perempuan Tidak Berkualitas di Bidang Politik



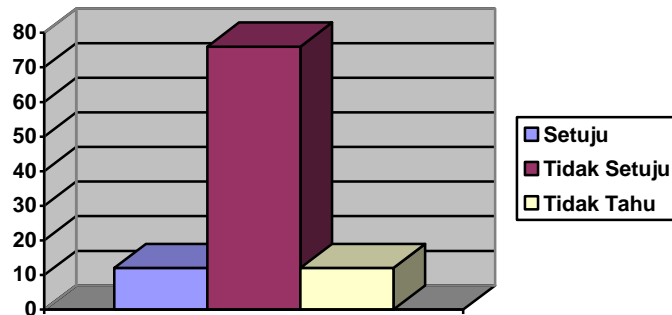
6. Pendapat Responden tentang Peluang Calon Legislatif Perempuan Membawa Aspirasi Perempuan

Diagram 9. Peluang Calon Legislatif Perempuan Membawa Aspirasi Perempuan



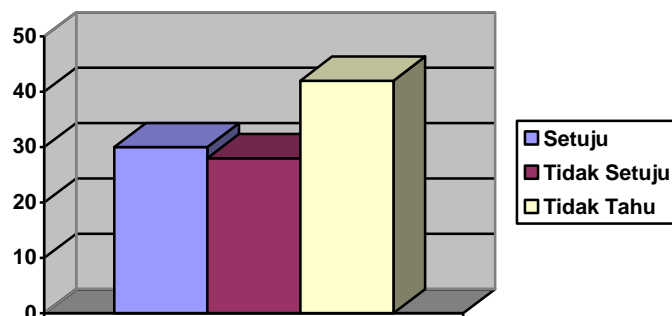
7. Pendapat Responden tentang Perempuan dalam Kancah Politik Masih Disangsikan karena Tabu Berpolitik

Diagram 10. Perempuan dalam Kancah Politik Masih Disangsikan karena Tabu Berpolitik



8. Pendapat Responden tentang Kecenderungan Memilih Calon Legislatif Perempuan dibandingkan Calon Legislatif Laki-laki

Diagram 11. Kecenderungan Memilih Calon Legislatif Perempuan dibandingkan Calon Legislatif Laki-laki



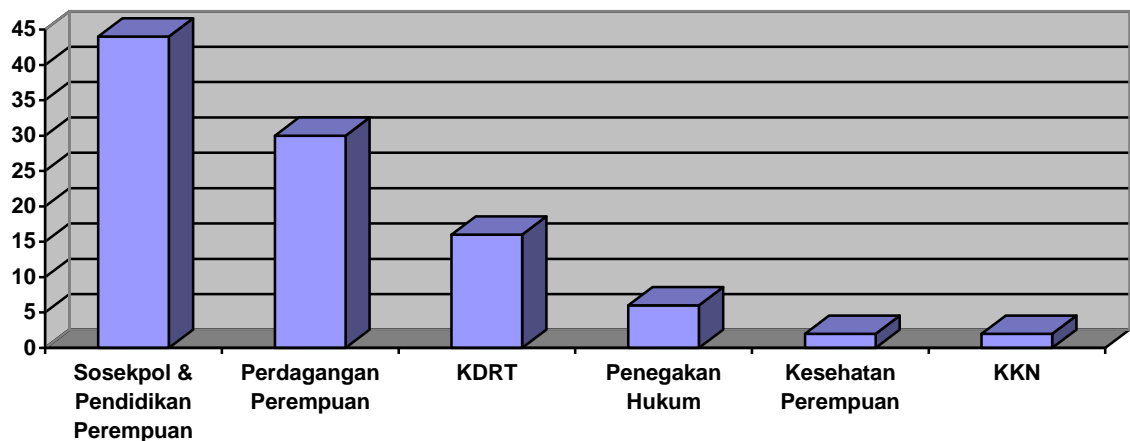
9. Kebijakan Prioritas bagi Perempuan di Kota Samarinda terhadap Calon Legislatif Perempuan

Terdapat beberapa kebijakan yang menjadi prioritas bagi perempuan di Kota Samarinda terhadap calon legislatif perempuan, yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan masalah sosial ekonomi, politik dan pendidikan perempuan,
2. Kebijakan masalah perdagangan perempuan (*women trafficking*),
3. Kebijakan masalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT),
4. Kebijakan masalah penegakan hukum,
5. Kebijakan masalah kesehatan perempuan, dan
6. Kebijakan masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Berikut data mengenai kebijakan yang menjadi prioritas bagi perempuan di Kota Samarinda terhadap calon legislatif perempuan :

Diagram 12. Kebijakan yang menjadi Prioritas bagi Perempuan di Kota Samarinda terhadap Calon Legislatif Perempuan



Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, dapat diketahui beberapa poin pendapat perempuan di Kota Samarinda mengenai keterwakilan perempuan dalam kancah politik sebagai berikut :

1. Perempuan di Kota Samarinda tercatat sebagai peserta pemilihan umum pada tahun 2004. Dalam hal ini, 94% responden menyatakan tercatat sebagai peserta pemilihan umum dan mempergunakan hak pilihnya.

2. Perempuan di Kota Samarinda berpendapat bahwa dengan tersedianya kuota bagi perempuan dalam badan legislatif sebesar 30%, maka akan meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik. Dalam hal ini, 46% responden menyetujui bahwa partisipasi perempuan dalam bidang politik akan meningkat dengan diberikannya kesempatan sebesar 30% bagi perempuan di parlemen.
3. Perempuan di Kota Samarinda berpendapat bahwa pemberian 'ruang' bagi perempuan dalam partai politik menjadikan perempuan ingin berpartisipasi dalam bidang politik. Dalam hal ini, 70% responden menyatakan tidak setuju bahwa perempuan tidak mau berpartisipasi dalam bidang politik, padahal partai politik telah memberi 'ruang' bagi perempuan.
4. Perempuan di Kota Samarinda berpendapat bahwa calon legislatif perempuan juga berpengalaman di bidang politik. Dimana dalam hal ini, 60% responden menyatakan tidak setuju apabila perempuan dikatakan tidak berpengalaman dalam bidang politik.
5. Perempuan di Kota Samarinda berpendapat bahwa calon legislatif perempuan juga berkualitas di bidang politik. Dalam hal ini, 100% responden menyatakan tidak setuju apabila perempuan dikatakan tidak berkualitas dalam bidang politik.
6. Perempuan di Kota Samarinda berpendapat bahwa calon legislatif perempuan akan membawa aspirasi perempuan dalam badan legislatif. Dalam hal ini 90% responden menyatakan yakin bahwa dengan terpilihnya perempuan sebagai anggota legislatif, secara otomatis mereka akan memperjuangkan aspirasi perempuan melalui badan legislatif.
7. Perempuan di Kota Samarinda berpendapat bahwa perempuan dalam kancah politik seharusnya tidak disangsikan akibat adanya stigmatisasi bahwa perempuan tabu berpolitik. Dalam hal ini 76% responden menyatakan tidak setuju akan stigma di masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan tabu berpolitik.
8. Perempuan di Kota Samarinda berpendapat bahwa mereka tidak tahu akan memilih calon legislatif perempuan atau calon legislatif laki-laki, karena hak pilih mereka akan dipergunakan untuk memilih calon legislatif yang memiliki

visi dan misi yang sesuai dengan aspirasi mereka. Dalam hal ini 42% responden menjawab tidak tahu berkaitan dengan hal tersebut.

9. Perempuan di Kota Samarinda berpendapat bahwa kebijakan mengenai masalah sosial, ekonomi, politik dan pendidikan perempuan merupakan prioritas kebijakan yang mereka harapkan dapat diperjuangkan oleh legislatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Suara perempuan yang selama ini hampir tidak terakomodasi dengan baik, mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam kancah politik. Penelitian ini berhasil menghimpun pendapat perempuan di Kota Samarinda mengenai keterwakilan perempuan dalam kancah politik sebagai berikut :

1. Mayoritas perempuan di Kota Samarinda tercatat sebagai peserta pemilihan umum pada tahun 2004.
2. Mayoritas perempuan di Kota Samarinda berpendapat bahwa dengan tersedianya kuota bagi perempuan dalam badan legislatif sebesar 30%, maka akan meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik.
3. Mayoritas perempuan di Kota Samarinda berpendapat bahwa pemberian 'ruang' bagi perempuan dalam partai politik menjadikan perempuan ingin berpartisipasi dalam bidang politik.
4. Mayoritas perempuan di Kota Samarinda berpendapat bahwa calon legislatif perempuan juga berpengalaman di bidang politik.
5. Mayoritas perempuan di Kota Samarinda berpendapat bahwa calon legislatif perempuan juga berkualitas di bidang politik.
6. Mayoritas perempuan di Kota Samarinda berpendapat bahwa calon legislatif perempuan akan membawa aspirasi perempuan dalam badan legislatif.
7. Mayoritas perempuan di Kota Samarinda berpendapat bahwa perempuan dalam kancah politik seharusnya tidak disangsikan akibat adanya stigmatisasi bahwa perempuan tabu berpolitik.
8. Mayoritas perempuan di Kota Samarinda berpendapat bahwa mereka tidak tahu akan memilih calon legislatif perempuan atau calon legislatif laki-laki, karena hak pilih mereka akan dipergunakan untuk memilih calon legislatif yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan aspirasi mereka.

9. Mayoritas perempuan di Kota Samarinda berpendapat bahwa kebijakan mengenai masalah sosial, ekonomi, politik dan pendidikan perempuan merupakan prioritas kebijakan yang mereka harapkan dapat diperjuangkan oleh legislatif.

Saran

Perempuan juga sebagai warga negara memiliki hak untuk dapat menyampaikan pendapat dan juga berhak memperoleh tanggapan mengenai aspirasi dan harapannya dalam kancah politik. Suara perempuan yang selama ini hampir tidak terakomodasi dengan baik memperoleh kesempatan melalui pemberian kuota sebesar 30% dalam badan legislatif.

Berkaitan dengan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hendaknya seluruh perempuan, khususnya di Kota Samarinda mempergunakan hak pilih politiknya dengan baik sebagai wujud pemberian suara dan aspirasi mereka bagi negara.
2. Hendaknya seluruh perempuan, khususnya di Kota Samarinda memberdayakan diri dalam bidang politik sebagai wakil perempuan yang akan memperjuangkan harapan dan aspirasi perempuan dalam badan legislatif agar suara perempuan dapat terakomodasi dengan baik.
3. Kualitas dan pengalaman seseorang di bidang politik tidak dapat diukur melalui stereotipe atas jenis kelamin.
4. Stigmatisasi di masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan tabu berpolitik perlu dibenahi agar aspirasi dan harapan perempuan tidak lagi dibatasi.
5. Pengetahuan akan visi dan misi dari setiap calon legislatif perlu dipahami oleh masyarakat agar tidak salah mempergunakan hak pilihnya. Sehingga pemilihan umum tidak berlangsung atas dasar like and dislike, KKN, ataupun unsur SARA.
6. Kebutuhan perempuan mengenai penanganan masalah sosial, ekonomi, politik dan pendidikan bagi perempuan perlu diperjuangkan dan menjadi prioritas bagi wakil rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana Venny. 2004. *Pesta Demokrasi : Berkah atau Mimpi Buruk ?*. Jurnal Perempuan 34. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Eko Bambang Subiyantoro. 2004. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik : Masih Menjadi Kabar Burung*. Jurnal Perempuan 34. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- MB. Wijaksana. 2004. *Perempuan dan Politik : Ketika yang Personal adalah Konstitusional*. Jurnal Perempuan 34. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Shirin Rai. Editor : Azza Karam. 1999. *Perempuan di Parlemen, Bukan Sekedar Jumlah Bukan Sekedar Hiasan*, terjemahan. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan – International IDEA.
- The Constitution of India*. [http : www.indiacode.nic.in](http://www.indiacode.nic.in).
- The Constitution of The People`s Republic of Bangladesh*. [http : www.bangladeshgov.org](http://www.bangladeshgov.org).
- The Constitution of Vietnam*. [http : www.ubqgphunu.gov.vn](http://www.ubqgphunu.gov.vn).